

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah perairan menjadi salah satu bagian dari sebuah negara yang memiliki fungsi strategis penting terutama dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan wilayah perairan, tentunya setiap negara lepas pantai memiliki batasan dalam wilayahnya. Akan tetapi, tumpang tindih dari sebuah batas perairan justru dapat menimbulkan konflik maupun perselisihan di antara negara-negara di sekitar wilayah perairan tersebut, seperti contohnya di perairan Laut China Selatan yang menjadi lembah ketegangan di wilayah Asia Timur. Ketegangan dan perselisihan tersebut terjadi mengingat kekayaan melimpah yang ada di Laut China Selatan yang tak bisa dipungkiri menjadi hal menggiurkan bagi setiap negara (Mustakim, 2024). Perairan Laut China Selatan menyimpan kekayaan perikanan yang melimpah serta cadangan minyak dan gas yang diperkirakan setidaknya kekayaan minyak dengan jumlah mencapai 213 miliar barel. Jumlah tersebut setara dengan cadangan minyak yang ada di Meksiko dan merupakan jumlah terbesar kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi (Ambarwati, 2023).

Selain itu, kepulauan Paracel dan Spratly yang menjadi wilayah bagian Filipina diperkirakan juga menyimpan kekayaan minyak sebanyak 105 miliar barel. Tak hanya menyimpan kekayaan hayati, Laut China Selatan juga memiliki nilai strategis yakni sebagai jalur perdagangan (*Sea Line of Trade*) dan sebagai jalur komunikasi internasional (*Sea Line of Communication*) yang menghubungkan berbagai negara (Ambarwati, 2023).

Filipina menjadi salah satu negara di Asean (*Association of Southeast Asian Nation*) yang terlibat dalam perselisihan sengketa kedaulatan dengan China terutama saat setelah China melontarkan klaim sembilan garis putus-putusnya (*Ninde-Dash Line Policy*) yang hanya mendasar pada aspek historis dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Terdapat beberapa wilayah Filipina yang masuk ke dalam sengketa ini, sebab China menduduki wilayah tersebut, diantaranya adalah Pulau Scarborough Shoal, Pulau Paracel, Pulau Spratly serta tiga pulau milik Filipina lainnya yang termasuk kedalam kelompok kepulauan Kalayaan yakni Pulau Cuarteron Reef, Pulau Fiery Cross Reef, Pulau Johnson Reef (Huang, 2015).

Perselisihan kedua negara tersebut kian memanas dari tahun ke tahun, terutama sejak 2004, tepatnya di bulan Maret saat *Chinese Coast Guard* atau pasukan penjaga pantai China menodongkan meriam air pada kapal milik Filipina yang sedang mencoba untuk memasok persediaan milik tentara Filipina yang ditempatkan di wilayah Second Thomas Shoal (Forum Indo Pacific Defense, 2024). Secara historis, China cenderung agresif dalam menangani masalah sengketa wilayah, pasalnya pada tahun 1955, China pernah mencoba untuk melakukan pendudukan atas wilayah karang Mischief Reef yang merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Spratly. Hal tersebut kemudian mendorong Filipina untuk mendirikan sebuah menara sebagai bentuk dari perlindungan wilayahnya. Tak hanya itu, agresivitas Beijing terhadap Manila dalam sengketa ini juga melibatkan militer, dimana pasukan militer China kerap kali melakukan penghadangan maupun melakukan manuver yang membahayakan terhadap kapal-kapal militer milik Filipina yang berada di Kepulauan Palawan. China bahkan membangun pangkalan

militernya sendiri yang terletak di dangkalan karang Kepulauan Spratly (Ramadani, 2019).

Menyikapi klaim wilayah oleh China yang semakin agresif, Filipina mulai mencari dukungan untuk mempertahankan teritorinya. Filipina mencari dukungan ke ASEAN pada 2011, yang kemudian berhasil meluncurkan *Declaration of Conduct* (DOC) ASEAN. Dokumen tersebut berisi seperangkat mekanisme untuk mengatur tata perilaku negara-negara yang berada di wilayah perairan Laut China Selatan (Ariansah, 2023). Pada tahun 2013, Filipina memulai proses arbitrasenya terhadap China di bawah konvensi hukum laut UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. Akan tetapi pada 19 Februari di tahun yang sama, China menolak untuk ikut serta dalam pengadilan arbitrase tersebut. Bahkan dalam sebuah konferensi pers, menteri luar negeri China Hong Lei yang saat itu menjabat, menyatakan dengan tegas bahwa Beijing tidak mengakui pengajuan Manila pada pengadilan arbitrase internasional terkait dengan klaim di Laut China Selatan (Shicun, 2016).

Terlepas penolakan China untuk ikut serta dalam pengadilan arbitrase tersebut, pada tahun 2016, berdasarkan *Press Release* Pengadilan Arbitrase Internasional, tribunal telah berusaha untuk mengevaluasi hak-hak maritim Filipina. Hak-hak tersebut meliputi kejelasan wilayah terumbu karang serta mempertimbangkan apakah tindakan reklamasi dan konstruksi yang dilakukan oleh China masuk kedalam zona maritim mereka. Berdasarkan hukum, pulau-pulau dapat memiliki zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil ke laut, apabila pulau tersebut dapat menopang kehidupan maupun adanya kehidupan ekonomi itu

sendiri. Artinya, klaim historis China tidak sesuai dengan hak dan zona maritim yang tercatat dalam konvensi internasional UNCLOS 1982, sehingga dengan kata lain hak-hak historis atas sumber daya di Laut China Selatan dihapuskan karena tidak sesuai dengan sistem zona maritim internasional yang ada. Selain itu Tribunal juga menyebutkan bahwa klaim dari China tidak satupun dapat menghasilkan zona ekonomi eksklusif, dan menyatakan bahwa wilayah laut tertentu yang menjadi klaim tersebut justru masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Filipina (Permanent Court of Arbitration, 2016). Namun, meski putusan dari Pengadilan Arbitrase Internasional sudah dinyatakan dengan jelas, China tetap kukuh dengan pendiriannya dan dengan jelas tidak menerima, mengakui maupun melaksanakan hasil putusan, karena menurut mereka, seluruh wilayah kedaulatan versi mereka bersifat mutlak, termasuk klaim teritorial China yang ada di wilayah Laut China Selatan (Ariansah, 2023).

Menanggapi sikap China yang bersikeras untuk melakukan klaim wilayah dan potensi konflik yang meningkat, mulai 2024, Filipina berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki masalah yang sama terkait dengan tumpang tindih wilayah perairan teritorial di Laut China Selatan, yakni Vietnam. Alasan Filipina merangkul Vietnam adalah karena Vietnam juga terlibat dalam perselisihan wilayah maritim Laut China Selatan dan hingga saat ini mereka juga masih berjuang untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan mendesak China untuk mematuhi hasil ketetapan yang tercantum dalam DoC (Ariansah, 2023). Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim, yakni kegiatan yang dilakukan dengan mengandalkan aset maritim dalam

mengelola hubungan internasional, yang salah satunya adalah untuk menangani ketegangan dalam bidang maritim (Setiawan A. N., 2020). Kerjasama Filipina dengan Vietnam ini dikenal dengan nama “*Maritim Cooperation*”. Kedua negara ini sepakat untuk meningkatkan kerjasama maritim mereka dengan kepentingan yang sama, yakni adalah untuk mengelola sengketa di Laut China Selatan. Alasan Filipina menawarkan Kerjasama dengan Vietnam adalah karena Filipina menganggap Vietnam sebagai satu-satunya mitra strategis di Asia Tenggara untuk menghadapi masalah sengketa wilayah ini (The Diplomat, 2024).

Berdasarkan pada data di atas, penulis berusaha untuk menganalisa proses diplomasi maritim yang dilakukan oleh Filipina melalui *maritim cooperation* dengan Vietnam sebagai langkah strategis untuk melindungi wilayah kedaulatan sekaligus menyikapi ketegangan di Perairan Laut China Selatan.

Adapun penelitian pertama yang relevan dalam konteks studi kasus ini adalah jurnal internasional yang berjudul “*Maritim Diplomacy in Building Maritim National Security in Indonesia*” (Sugiharto, 2021). Penelitian tersebut memaparkan strategi diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi ketegangan sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan, beserta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses menciptakan stabilitas keamanan maritim.

Selanjutnya, penelitian kedua yang juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah jurnal yang berjudul “Ketegangan Filipina Dan China Di Laut China Selatan Serta Upaya ASEAN Dalam Mengatasinya” (Lisbet, 2023). Dalam penelitian ini, dijelaskan secara rinci terkait dengan Konflik Laut China Selatan

yang melibatkan Filipina dan China, sekaligus inisiatif oleh organisasi regional ASEAN seperti melalui *CoC* dan *DoC* maupun kegiatan negosiasi dalam bentuk (KTT) Konferensi Tingkat Tinggi.

Berikutnya, penelitian ketiga yang digunakan sebagai rujukan dalam kasus ini adalah penelitian berbentuk skripsi milik mahasiswa S1 Universitas Brawijaya dengan judul “*Maritim Diplomacy* Amerika Serikat di Laut China Selatan Tahun 2015-2016” (Tulhaq, 2017). Skripsi tersebut menjelaskan tentang kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan oleh Amerika di Laut China Selatan, sebagai bentuk dari (*coercive diplomacy maritim*) diplomasi maritim yang koersif dan sikap tegas AS atas kebijakan asertif China di Laut China Selatan, yang merupakan desakan dan aspirasi dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Terakhir, penelitian keempat yang juga dapat menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini adalah Jurnal dengan judul “*Maritim Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia milik Indonesia” (Nugraha, 2016). Jurnal tersebut membahas tentang urgensi dari diplomasi maritim sebagai pilar utama dalam membangun stabilitas keamanan maritim di Indonesia yang dilakukan oleh militer Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan diplomasi maritim.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara spesifik kasus sengketa Filipina di wilayah perairan Laut China Selatan, yang menggandeng Vietnam untuk bekerjasama dalam sebuah program *maritim cooperation*. Program ini dicetuskan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga wilayah

kedaulatan mereka di sekitar perairan Laut China Selatan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan oleh Filipina melalui diplomasi maritim kooperatif dan persuasif (*cooperative and persuasive maritim diplomacy*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, dengan demikian rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana proses diplomasi maritim Filipina melalui kerjasama bilateral dengan Vietnam dalam mempertahankan kedaulatan teritorialnya di Laut China Selatan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan menelaah, sekaligus mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan oleh penulis sebelumnya. Secara umum penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk bisa mencukupi syarat dalam pemenuhan untuk memperoleh gelar dari program sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”.

1.6.1 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan oleh Filipina melalui kerja sama operasi

maritim dengan Vietnam sebagai upaya dalam melindungi kedaulatan wilayah teritorial di sekitar perairan Laut China Selatan .

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim apabila jika dibandingkan dengan konsep diplomasi yang lain, dapat dikatakan sebagai konsep yang terbilang baru. Hal ini karena penggunaan diplomasi maritim tidak sebanyak penggunaan istilah *gunboat diplomacy* ataupun *naval diplomacy* (Tulhaq, 2017). Salah satu tokoh yang menjabarkan terkait konsep diplomasi maritim adalah Christian Le Miere dalam buku bertajuk “*Maritim Diplomacy in the 21st Century*” Christian Le Miere (2014, hal. 7). Dalam bukunya tersebut Le Miere menyebutkan bahwa diplomasi maritim merupakan kegiatan berdiplomasi dengan menggunakan aset maritim dalam mengelola hubungan internasional termasuk didalamnya mengelola ketegangan maritim.

Konsep diplomasi maritim sendiri tidak sama seperti *gunboat diplomacy* maupun *naval diplomacy*, hal ini karena diplomasi maritim terbagi atas beberapa elemen utama yang disebut dengan diplomasi maritim kooperatif (*cooperative*), persuasif (*persuasive*) dan koersif (*coercive*) dengan aktivitas didalamnya dapat berupa pertukaran personil, program peningkatan keterampilan maupun pertemuan kolaboratif yang tidak lain bertujuan untuk membangun hubungan kepercayaan bersama (Miere, 2014).

Kedaulatan dalam maritim diplomasi dapat dilihat sebagai kedaulatan politik dan keutuhan wilayah yang dalam implementasinya dapat diarahkan pada penguatan kerjasama, perundingan di perbatasan maupun dengan meningkatkan kapabilitas pertahanan dan ketahanan maritim untuk mendukung tercapainya stabilitas keamanan maritim di wilayah pesisir (Sugiharto, 2021). Dalam penelitian ini berdasarkan ketiga spektrum diplomasi maritim yang dicetuskan oleh Christian Le Miere, aktifitas diplomasi maritim yang dilakukan oleh Filipina cenderung dilihat sebagai bentuk diplomasi maritim kooperatif dan persuasif. Hal ini karena kooperatif sendiri menggaris bawahi pada penggunaan soft power yang dalam implementasinya meliputi beberapa kegiatan seperti penyaluran bantuan kemanusiaan, kunjungan maupun latihan bersama; serta persuasif yang menegaskan pada upaya membentuk reputasi dalam lingkup maritim yang tujuannya tidak lain adalah untuk meyakinkan negara lain akan hadirnya kekuatan yang dari suatu negara yang dalam hal ini juga dikenal dengan istilah “*showing the flag*” (Nisa, 2020).

Dalam diplomasi maritim sendiri pada umumnya tidak sesempit diplomasi kapal perang yang hanya melibatkan aktor militer angkatan laut, akan tetapi lebih luas diplomasi maritim juga melibatkan aktor lainnya seperti penjaga pantai (*coast guard*), polisi laut dan seluruh kekuatan laut lainnya yang digunakan sebagai alat dalam mencapai kepentingan operasi maritim. Selain itu diplomasi maritim juga dapat tunjukan sebagai alat penggetar (*deterrence*) dalam meyakinkan suatu pihak maupun menahan dan menangkal berbagai upaya tindakan maritim yang mungkin terjadi (Nugraha, 2016).

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua konsep diplomasi maritim milik Le Miere yakni, kooperatif dan persuasif. Alasan tidak mengikutsertakan koersif, meskipun menjadi salah satu bagian dari diplomasi maritim dikarenakan kasus diplomasi maritim Filipina-Vietnam ini tidak masuk ke dalam jenis diplomasi maritim koersif, merujuk pada pengertian yang dicetuskan oleh Le Miere sendiri diplomasi maritim koersif merupakan diplomasi maritim yang mengandalkan aset kekuatan militer yang bersifat agresif seperti contoh, pengerahan kapal perang maupun tindakan militer lainnya yang bertujuan untuk mengancam ataupun mengintimidasi lawan, sehingga kegiatan diplomasi tersebut cenderung asertif dan dapat membahayakan, hingga lebih parah dapat memicu terjadinya perang.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa diplomasi maritim yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak lain adalah tentang upaya memperkuat hubungan kerja sama dalam mengelola tantangan maritim global, yang di dalamnya mencakup dialog bersama yang menghasilkan kesepakatan terkait dengan masalah keamanan maritim, perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Seniwati, 2024). Dengan menggunakan teori ini nantinya penulis dapat mampu menjelaskan peran penting diplomasi maritim dalam menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan kawasan serta kepentingan nasional dari negara yang terlibat dalam kegiatan diplomasi.

1.4.2 Diplomasi Maritim Kooperatif

Menurut buku Christian Le Miere (2014, hal. 7) “*cooperative maritime diplomacy is testament to the particular flexibility of naval forces*” yang artinya diplomasi koersif tersebut merupakan kegiatan diplomasi maritim yang lebih condong terhadap penggunaan *soft power* dimana negara lebih memilih untuk bekerjasama secara damai tanpa melibatkan kekerasan dalam mengatasi permasalahan maritim yang kompleks dengan mencakup aktivitas humanis yang dapat meningkatkan kepercayaan (*confidence building measure*).

Kemudian Le Miere dalam bukunya membagi bentuk dari diplomasi maritim kooperatif kedalam 4 aktivitas beserta dengan tujuan masing-masing seperti; pertama, *Humanitarian Assistance and Disaster Response* (bantuan kemanusiaan), yakni sebuah misi kemanusiaan atau penanggulangan bencana yang dilakukan oleh angkatan laut, sebagai bentuk dukungan terhadap negara sahabat. Contohnya seperti misi kemanusiaan yang dijalankan oleh US saat terjadi gempa bumi dan tsunami Jepang di tahun 2011, dimana tindakan yang dilakukan oleh US tidak hanya dianggap sebagai upaya membantu negara yang mengalami kesulitan akan tetapi juga untuk latihan menjalin hubungan masyarakat, bagi sebuah organisasi yang sering dilihat dengan rasa curiga terutama di beberapa wilayah Jepang tempat mereka bermarkas (Miere, 2014).

Kedua, *Good Will Visit* (Kunjungan), kunjungan dalam diplomasi maritim menurut Le Miere yakni berupa kunjungan ke pelabuhan, kunjungan kapal atau kunjungan oleh instansi pemerintah suatu negara (*personal visit*) yang bertujuan

untuk membangun hubungan antar militer serta mendorong keterbukaan dan rasa percaya. Contohnya seperti kunjungan angkatan laut US terhadap Vietnam di tahun 2009 yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan era tantara US-Vietnam dimana US juga memberikan bantuan perbaikan kapal milik Vietnam yang sekaligus secara implisit juga menunjukkan adanya keterlibatan US di perairan Laut China Selatan (Miere, 2014).

Ketiga, *Training and Joint Exercise* (latihan gabungan), bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkatan laut suatu negara sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama, sekaligus untuk memperlihatkan pada rival potensial akan sifat dari angkatan laut yang tidak mengancam. Contoh dari latihan gabungan ini adalah latihan gabungan yang diberikan oleh Jepang terhadap Vietnam dan Filipina. Pemilihan Vietnam dan Filipina sebagai mitra latihan gabungan Jepang tidak lain karena kedua negara ini sama-sama menerima tindakan agresif dari China di perairan Laut China Selatan sehingga Jepang memiliki harapan untuk membangun aliansi yang lebih kuat dengan negara yang sama-sama menghadapi masalah serupa (Miere, 2014).

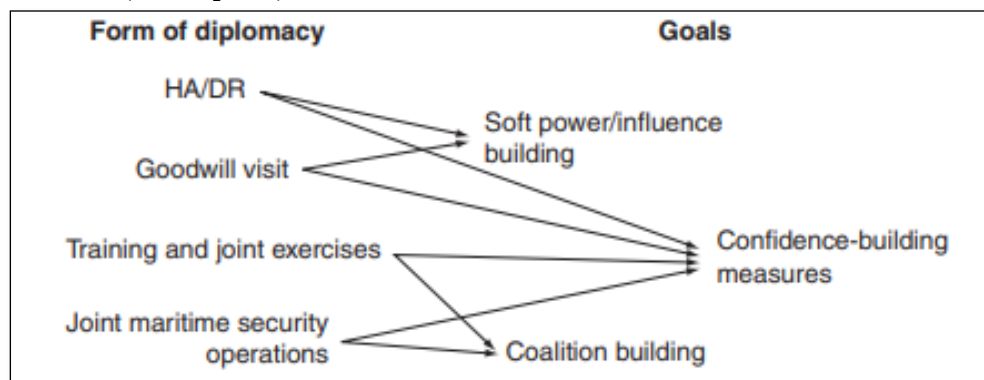
Keempat, *Joint Maritime Security Operations* (operasi maritim bersama), merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas dari angkatan laut suatu negara dimana aktivitasnya dapat berupa pelatihan bersama ataupun melalui sebuah operasi bersama dengan tujuan untuk berbagi informasi, meningkatkan hubungan kerjasama sekaligus untuk menunjukkan pada rival bahwa negara tersebut memiliki kekuatan dalam menghadapi ancaman potensial di wilayah perairan mereka. Contohnya adalah operasi maritim yang dirancang untuk

mengatasi imigrasi ilegal di laut, perdagangan manusia, perampokan di laut hingga operasi penegakan akan kebebasan laut (Miere, 2014).

Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam bukunya yakni:

“co-operative maritim diplomatic events all share a common pool of political goals towards which they aim. Each event is seeking to build either influence, coalitions/alliances or confidence. Co-operative maritim diplomacy does not aim to bully, deter or compel, nor to forcefully persuade. Rather, it uses the tools of attraction, co-option and inspiration to entice or reassure other governments”- Christian Le Miere (2014, p. 11).

“Acara-acara diplomasi maritim kooperatif memiliki tujuan politik yang sama yang menjadi sasaran mereka. Setiap acara bertujuan untuk membangun pengaruh, koalisi/alianse, atau kepercayaan. Diplomasi maritim kooperatif tidak bertujuan untuk mengintimidasi, mencegah, atau memaksa, maupun untuk meyakinkan secara paksa. Sebaliknya, dia menggunakan alat-alat daya tarik, kooptasi, dan inspirasi untuk menarik atau meyakinkan pemerintah lain” - Christian Le Miere (2014, p. 11).



Gambar 1. 1 bentuk dari diplomasi maritim kooperatif dan tujuannya

Sumber: *Maritim Diplomacy in the 21st Century* (Miere, 2014).

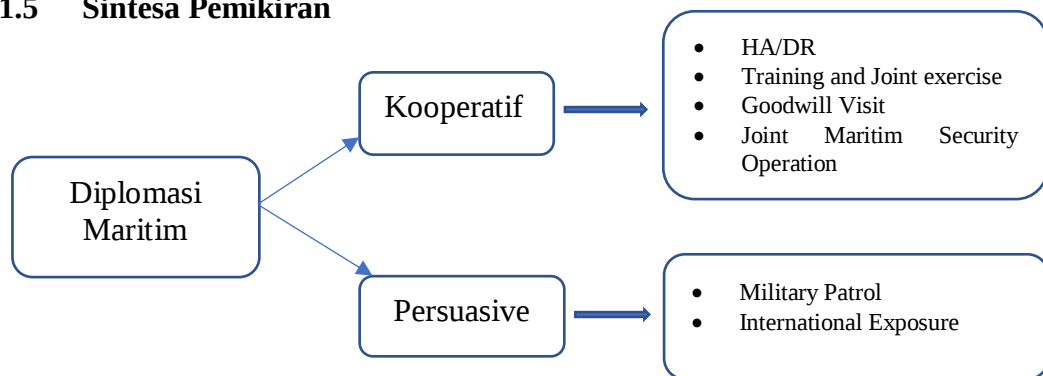
1.4.3 Diplomasi Maritim Persuasif

Menurut Christian Le Miere (2014, hal. 13) berbeda dengan diplomasi maritim kooperatif, tipe diplomasi maritim persuasif lebih condong pada upaya “*showing the flag*” yakni menciptakan *prestige* di ranah maritim dengan tujuan untuk meyakinkan negara lain terkait hadirnya kekuatan atau kapabilitas dari suatu negara baik militer maupun sumber dayanya. Dengan kata lain menurut Le Miere diplomasi maritim persuasif ini bertujuan untuk “*To instill within others a sense of a maritim force’s presence, without attempting to affect other actors’ policies*” - Christian Le Miere (2014, p. 13).

Selain itu diplomasi maritim persuasif juga cocok digunakan sebagai perisai oleh negara-negara berkembang yang bersengketa di Laut China Selatan, terutama sebagai negara yang terus menghadapi tekanan dari negara yang lebih besar dengan memanfaatkan kekuatan militer maupun non militer. Hal ini dikarenakan diplomasi maritim memiliki fungsi strategis sebagai tanda untuk menunjukkan kependudukan efektif pada wilayah *vis-a vis*, dengan harapan negara-negara pengklaim dapat tunduk pada keputusan UNCLOS yang hingga saat ini belum mampu menghasilkan resolusi memadai untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi di wilayah perairan Laut China Selatan (Putra B. A., 2024). Beberapa bentuk kegiatan diplomasi persuasif yang dilakukan baik dengan menggunakan kekuatan militer ataupun non-militernya adalah melakukan patroli dengan membawa bendera negara sebagai bentuk untuk menunjukkan eksistensi atau kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi maritim persuasif hadir sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan adanya legitimasi dari negara lain terhadap keterlibatan negara yang berusaha meyakinkan tersebut dalam kegiatan kemaritiman sekaligus menggalakkan negara lain yang dituju terkait efektifitas dari sumberdaya maritim maupun keberadaan personil militer yang dimiliki (Leucci, 2014).

1.5 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan uraian teori yang penulis jelaskan, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai proses diplomasi maritim sesuai dengan teori Le Miere. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kerja sama dapat dikategorikan sebagai diplomasi maritim apabila memenuhi dua hal, yakni kooperatif dan persuasive. Pada kategori kooperatif beberapa hal yang telah dilakukan Filipina diantaranya *HA/DR* atau bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Vietnam saat terjadi badai topan Haiyan di Filipina tahun 2013. Kemudian *Training and Joint Exercise* atau latihan gabungan angkatan militer maritim telah sering dilakukan oleh kedua negara, terutama setelah terjalinnya kerjasama *maritime cooperation* tahun 2024.

Good will visit merupakan kunjungan yang dilakukan oleh aktor negara, baik Filipina maupun Vietnam keduanya aktif melakukan kunjungan, seperti kunjungan

penjaga pantai Vietnam terhadap Filipina di tahun 2025. Terakhir *Joint Maritim Operation*, yang didalamnya terdiri atas berbagai kegiatan yang terkoordinasi diatas lautan. Sedangkan untuk konsep terakhir yakni persuasif dapat diartikan sebagai kegiatan diplomasi maritim yang bertujuan untuk menarik perhatian global. Beberapa bentuk diplomasi *maritime persuasive* yakni kegiatan diplomasi yang berfokus dengan menunjukan kehadiran dari suatu angkatan laut atau penjaga pantai telah dilakukan Filipina dan Vietnam dalam berbagai kegiatan seperti *military patrol* dan *international exposure*.

1.6 Argumen Utama

Dengan penyusunan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka muncul hipotesis yang akan menjadi jawaban sementara dalam penelitian ini. Kebijakan asertif China di wilayah perairan Laut China Selatan telah mendorong Filipina untuk mengambil sikap dan langkah langkah strategis yang bersifat diplomatis dalam mempertahankan wilayah kedaulatannya melalui kerjasama bilateral dengan Vietnam sebagai salah satu negara yang juga terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Alasan terjalin kerjasama keduanya di latar belakang oleh kesamaan masalah yakni sengketa dengan China di perairan Laut China Selatan serta kedekatan hubungan dan geografi dari kedua negara. Kegiatan diplomasi kedua negara tersebut direpresentasikan oleh para petinggi negara yang menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama maritim (*maritime cooperation*) yang dalam topik ini penulis teliti menggunakan teori diplomasi maritim milik Le Miere.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan berpikir logis dengan menggunakan metode ilmiah yang dituangkan pada suatu tulisan dan bertujuan untuk menggali pengetahuan (Sinaga, 2023). Pendekatan kualitatif dijelaskan oleh Abdussamad (2021, hal. 21) sebagai sebuah penelitian yang tujuannya adalah untuk memahami gejala-gejala sosial yang ada tanpa memerlukan kuantifikasi atau perhitungan sehingga pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kata-kata serta susunan kalimat dalam menjawab hipotesis maupun premis dan latar belakang yang ada dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana proses diplomasi yang dilakukan oleh Filipina dengan Vietnam sebagai akibat dari kebijakan asertif China di Laut China Selatan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Simanjuntak dalam buku Metode Penelitian (2011, hal. 34), metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan proses dari suatu fenomena yang terjadi secara obyektif. Dengan kata lain penelitian yang akan dilakukan ini berusaha untuk memberikan gambaran detail terkait bagaimana proses diplomasi antara Filipina dengan Vietnam terjadi, sebagai upaya dalam melindungi wilayah kedaulatan nya. Hal ini karena dalam penelitian ini penulis telah dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dengan menggunakan kerangka berpikir (*conceptual definition*) yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti (Hernawati, 2017).

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu yang akan diambil sebagai data penunjang dalam penelitian ini berada di rentang waktu antara tahun 2024-2025. Alasan mengapa penulis menggunakan jangkauan waktu tersebut adalah karena rangkaian yang terdapat dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2024 saat Filipina-Vietnam menandatangani MoU dari *maritime cooperation* yang mengatur terkait kerjasama maritim kedua negara, sehingga penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dari diplomasi maritim yang dilakukan oleh kedua negara hingga saat ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data sekunder yang melalui sumber-sumber berupa website resmi, jurnal, buku, dokumen dan artikel yang diakses secara online yang berkaitan dengan aktivitas maritim Filipina-Vietnam. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain pihak ketiga untuk tujuan yang berbeda dari yang sedang penulis lakukan. Hal ini mencakup statistik resmi dan dataset survei, hingga dokumen, arsip, dan transkrip wawancara yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks historis, pemahaman yang lebih luas (Harley, 2019).

1.6.5 Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat, memberikan kesimpulan, sekaligus mendukung pengambilan

keputusan (Patton, 2015). Proses memaknai, membandingkan dan mengkontraskan data, mengidentifikasi pola dan tema, serta membangun konsep dan teori (Merriam, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan alasan, penulis berupaya untuk menganalisis, mengolah dan membandingkan data yang telah dikumpulkan. Dari proses ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah dan mengambil kesimpulan dari topik yang penulis teliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan penulis telah membagi sistematika penulisan penelitian ini ke dalam lima bab utama yang tersusun atas sebagai berikut:

BAB I. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, argumen utama, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data hingga sistematika penelitian.

BAB II. Dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait proses dan tujuan dari diplomasi maritim kooperatif Filipina dengan Vietnam untuk menurunkan ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan.

BAB III. Dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait proses diplomasi maritim persuasif Filipina dengan Vietnam dalam mengatasi tensi ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan.

BAB IV. Dalam bab ini akan berisi penutup dan kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah menjawab rumusan masalah, beserta kritik dan saran para pembaca untuk penulis.